

Menyongsong pameran senilukis Indonesia 1980: Dari Beo Menuju Sang Maha Empu Dalam Seni Rupa Kita

OLEH: MUHAMMAD ALI

Lima orang pembicara akan tampil pada diskusi seni rupa yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta dalam rentetan pameran Binale Seni Lukis Indonesia 1980 pertengahan Januari 1981. Mereka masing-masing adalah pelukis-pelukis Hardi, Bambang Budyono, Drs. Sudarmaji, Kusnadi dan seorang pelukis senior Surabaya, Krishna Mustajab.

Diskusi tersebut diharapkan akan sangat menarik dan ramai sekali, karena masalah kesenirupaan Indonesia memang senantiasa ada saja dan tak kunjung reda. Ditambah lagi para pelukis kita biasanya punya temperamen yang agak "panas" dan gampang tersinggung.

Krishna Mustajab menyiapkan sebuah kertas-kerja yang

tebalnya lebih dari 17 halaman yang akan dilontarkannya dalam forum diskusi tersebut. Dalam suatu tanya-jawab santai, menyinggung hal-hal yang akan jadi topik pembicaraannya Krishna antara lain menyatakan, bahwa terdapat dua pokok masalah seni rupa kita dewasa ini yang perlu mendapat sorotan, ialah masalah otorita dan wester-nisasi di dunia seni rupa Indonesia.

Karena perspektif seni lukis Indonesia pada gambaran utamanya dapat dikatakan identik dengan perjalanan daripada kewenangan-kewenangan berikut pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya, maka dalam pembahasan

itu nanti kewenangan dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya merupakan masalah yang paling utama, demikian Krishna.

Adapun yang dimaksudkan dengan kewenangan atau otorita, menurut Krishna adalah: a. Wewenang yang dimunculkan oleh adanya suatu ide, baik dari perorangan ataupun dari kelompok tertentu yang pada gilirannya mendapat pengakuan sebagai sesuatu yang perlu diikuti dan dipatuhi. b. Wewenang yang ditimbulkan oleh kekuasaan yang dipunyai oleh pihak-pihak tertentu, perorangan atau kelompok, sehubungan dengan kedudukan atau jabatan, sehingga ide-ide atau pendapat-pendapatnya mempunyai kekuatan yang mengikat dan bahkan mengarahkan pendapat umum.

Krishna Mustajab mengelompokkan apa yang dikatakannya kewenangan atau otorita itu dalam tiga kategori, ialah: 1. Kewenangan seni lukis, 2. Kewenangan budaya (cultural authority), 3. kewenangan politik.

Sebagai contoh Krishna mengemukakan, bahwa pada suatu kurun masa tertentu pernah dicanangkan oleh para seniman Eropa gagasan L'art pour L'art yang juga mendapatkan pengaruhnya di tanah air kita. Lambat laun pernyataan itu menjadi semacam otorita budaya yang mendapatkan pengikut-pengikutnya. Hampir bersamaan dengan itu gaya realisme sosial sebagai produk Komunisme juga mendapatkan penerapannya di Indonesia lewat

PKI pada waktu itu yang kemudian menggalang kubu pelukis yang menempatkan mereka pada garis partai yang mengumandangkan "politik adalah panglima".

Kondisi yang nyata sekarang, kata Krishna lebih lanjut, ialah kacaunya otorita dalam dunia seni lukis kita. Pertentangan yang sering terjadi antara para pemegang otorita ternyata banyak menimbulkan kesulitan, melahirkan citra negatif, membingungkan para pelukis kita dan menghambat perkembangan seni lukis kita.

Pernyataan beberapa tokoh tentang penolakan mereka untuk mengakui lukisan batik sebagai karya seni murni dan sekaligus menyatakan bahwa lukisan batik hanyalah merupakan hasil kerajinan dan pengaruh pernyataan itu terasa sampai saat ini, antara lain tidak diikuti sertakannya lukisan batik dalam pameran binale 1980.

Tentang apa yang disebutnya westernisasi di bidang seni lukis, Krishna menyatakan, bahwa dengan kepesatan perkembangan kebudayaan kelontong dewasa ini ternyata lebih condong ke arah westernisasi daripada kecenderungannya kepada modernisasi. Pengaruhnya terhadap seni lukis kita ialah: seni lukis Indonesia hanyalah merupakan pencerminan corak dari pertumbuhan seni lukis Barat dari waktu ke waktu. Apabila keadaan ini dibiarkan terus berlarut-larut, tidak lebih kita hanya akan menjadi epigon-epigon yang setia menganut seni lukis Barat.

Untuk mengindarkan kemungkinan itu, Krishna berpendapat, bahwa harus ada usaha-usaha ke arah persiapan

kondisi kreatif yang lebih baik dan bertanggung-jawab, untuk menyongsong lahirnya sang maha empu, grand masters yang akan mengibarkan panji-panji seni lukis Indonesia sejajar dengan apa yang ada dan terjadi di dunia Barat. Harus segera ditinggalkan peran sebagai beo seni lukis Barat yang mencengkam kita selama ini dan berperulah sebagai pelopor yang berwatak dan beridentifikasi.

Memang sulit untuk memisahkan kondisi kreatif dalam

seni lukis kita dari keseluruhan proses kebudayaan bangsa di dunia, karena kreativitas dalam seni lukis merupakan mata rantai dalam arus kebudayaan bangsa di dunia ini. Langkah yang perlu kita ambil, antara lain ialah membuat sketsa tentang rencana-rencana kita yang ideal bagi masa depan, menyiapkan sebuah bangunan budaya yang serba konseptual, khusus yang menyangkut bidang seni lu-

kis. Menggiring seni lukis kita selain kepada gerakan nasional juga meningkatkannya kepada gerakan internasional. Mengurangi jarak dan keterpencilan kita dari peraturan seni lukis dunia.

Pada hemat saya, kata Krishna pula, kini terdapat tiga pola ekspresi pada seni lukis Indonesia yang sepintas lalu menyiratkan sbb.: 1. Lukisan yang bagus, bentuk maupun suasananya, tapi nampak kebarat-baratan. 2. Lukisan dengan corak Barat, tapi bersuasana Indonesia. 3. Lukisan yang digarap dengan memakai unsur-unsur campuran yang memantulkan motif-motif tradisional.

Melihat kondisi tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang patut dikembangkan untuk lebih mempercepat proses kearah penemuan identifikasi dalam seni lukis Indonesia adalah pola kedua dan ketiga tersebut.

Dengan menyadari kekurangan dan kelebihan yang ada pada kita, marilah kita melangkah dengan penuh harapan ke masa depan seni lukis Indonesia yang lebih cerah dan wajar. Sudah tiba saatnya kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah-sudah demi per-

kembangan seni lukis kita, demikian Krishna menyudahi pernyataannya.

Muhammad Ali.